



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA TAHUN 2018**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

**Memperhatikan :**

1. Surat Walikota Surabaya Nomor 188.45/11384/436.1.2/2017 tanggal 17 Nopember 2017 perihal Penyampaian Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018;
2. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 591/Kom A/XI/17 tanggal 29 Nopember 2017 Perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa;

3. Surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 39/KomisiB/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 Perihal Pengajuan Judul Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya Tahun 2018;
4. Surat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 316/KOM.C/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2016 Perihal Usulan Judul Raperda Usul Prakarsa.
5. Surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 74/Komisi.D/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal Pengajuan Judul Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya Tahun 2018.
6. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya tanggal 23 Nopember 2017.
7. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 29 Nopember 2017
8. Rapat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 30 Nopember 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018.**

**KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018.

**KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

**KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Nopember 2017

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA,**



**MASDUKI TOHA**

## DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	Ket.
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA</b>									
1.	Pengelolaan Sampah Medis		V					1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; 3. Dinas Lingkungan Hidup; dan 4. RSUD.	BPP
2.	Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Higienis		V		Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal			1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Dinas Perdagangan; dan 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.	BPP
3.	Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014			1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; dan 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	Komisi A

								4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 5. Dinas Perdagangan.	
4.	Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	V					1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 5. Dinas Perdagangan.	Komisi B
5.	Penyelenggaraan Angkutan Publik	Penyelenggaraan Angkutan Publik	V					1. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 2. Dinas Perhubungan.	Komisi C
6.	Kepemudaan	Kepemudaan	V					1. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Dinas Pendidikan; dan 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisi D

7.	Aplikasi Taxi Online	Aplikasi Taxi Online	V			V		1. Dinas Perhubungan; dan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika.	BPP
8.	Perlindungan Tenaga Kerja lokal Surabaya	Perlindungan Tenaga Kerja lokal Surabaya	V			V		1. Dinas Tenaga Kerja; dan 2. Dinas Sosial.	BPP
9.	Penyelenggaraan Perijinan	Penyelenggaraan Perijinan	V			V		1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah.	Komisi A
10.	Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya	Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya	V			V		1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah.	Komisi B
11.	Pengelolaan / Audit Management Energi Perkotaan	Pengelolaan / Audit Management Energi Perkotaan	V			V		1. Inspektorat; 2. Badan Kepegawaian dan Diklat; dan 3. Badan Perencanaan Pembangunan.	Komisi C
12.	Sistim Kesehatan Daerah	Sistim Kesehatan Daerah	V			V		1. Dinas Tenaga Kerja; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.	Komisi D

13.	Penataan Perumahan Kumuh dan atau Permukiman Kumuh;	Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan atau Permukiman Kumuh;		V		V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan;</li> <li>2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Dinas Pengelolaan bangunan dan Tanah;dan</li> <li>4. Bagian Hukum</li> </ol>	
14.	Kompensasi Pekerjaan Konstruksi terhadap Lingkungan Sekitar;	Pengelolaan dan Kompensasi dampak Pekerjaan Konstruksi terhadap Lingkungan Sekitar		V		V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan;</li> <li>2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tata Ruang</li> <li>3. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah</li> <li>4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan ;</li> <li>5. Bagian Hukum;</li> <li>6. Bagian Administrasi Pembangunan;dan</li> <li>7. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset</li> </ol>	
15.	Penyelenggaraan Perparkiran	Penyelenggaraan Perparkiran		V	1. UU. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	V		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangun;</li> <li>2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah ;</li> <li>3. Dinas Perhubungan;dan</li> <li>4. Bagian Hukum.</li> </ol>	

					2. PP No 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing				
16.	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)		V		V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Perhubungan; 4. Bagian Administrasi pembangunan; dan 5. Bagian Hukum	
17.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin		V	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 3. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	1. Inspektorat 2. Bagian Hukum 3. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otda; 4. Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Bakesbangpol Linmas; 6. Badan Kepegawaian dan Diklat; 7. Bagian Organisasi; 8. Sekretaris DPRD	
18.	Tempat Hunian Berimbang	Tempat Hunian Berimbang		V				1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	

19.	Pembatasan Angkutan Kelas Jalan dan/atau Klasifikasi Jalan	Pembatasan Angkutan Kelas Jalan dan/atau Klasifikasi Jalan		V				1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah ; 3. Dinas Perhubungan;dan 4. Bagian Hukum.
20.	Perlindungan Makanan	Perlindungan Makanan		V		V		1. Dinas Kesehatan;dan 2. Dinas Sosial.
21.	Pelayanan Pembinaan dibidang Ketenagakerjaan	Pelayanan Pembinaan dibidang Ketenagakerjaan		V	1. UU. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. PP. Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah ; 3. Dinas Tenaga Kerja; 4. Bagian Organisasi; 5. Kantor Imigrasi;dan 6. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
22.	Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame	Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame		V	Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V		1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah ; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;dan 4. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018								
23	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok	Penambahan Kawasan Tanpa Rokok yang semula 5 (lima) kawasan menjadi 7 (tujuh) kawasan		V	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok		V	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Lingkungan Hidup; dan 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
24.	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
25.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Penyempurnaan & penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
26.	Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	V		1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	V		1. Dinas Perdagangan; dan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

27.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penyempurnaan tujuan, kinerja dan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		V	-	V		1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; dan 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya.
28.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya	V		-	V		1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; dan 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya.
29.	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	Merubah ketentuan Perda Kodya Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan PD. RPH Kodya Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Perda Kodya Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988.	V		-	V		1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; dan 2. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.
30.	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	V		-	V		1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; dan 3. Dinas Perhubungan.
31.	Rumah Susun	Pengaturan Rumah Susun	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	V		1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

32.	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
33.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman		V			V	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; dan 3. Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau.
34.	Bangunan	Penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru	V		Permen PUPR Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 6/PRT/M/2017	V		1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
35.	Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Penyesuaian tarif retribusi		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

36.	Pencabutan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Mencabut seluruh ketentuan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		V			V	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.	
37.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang		V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Lingkungan Hidup;</li> <li>2. Dinas Pemadam Kebakaran;</li> <li>3. Dinas Perhubungan;</li> <li>4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;</li> <li>5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; dan</li> <li>6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.</li> </ol>	
38.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Penyesuaian dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan dalam UUNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014		V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan;</li> <li>2. Dinas Pendidikan; dan</li> <li>3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.</li> </ol>	

39.	Perkoperasian	Perkoperasian di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian			1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
40.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		V	-		V	Dinas Komunikasi dan Informatika.
41.	Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya	Pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; dan 3. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset.
42.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; dan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

43.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya	Penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya		V	-		V	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; dan 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	
44.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Menghapus beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014.		V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
45.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya	Penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya		V	-		V	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.	
46.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	Penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah		V	-		V	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.	

47.	Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	Penetapan Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	V		Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Rumah Sakit	V		1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 2. Dinas Kesehatan; dan 3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie.	
48.	Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya	Perubahan beberapa nomenklatur Perangkat Daerah		V	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah		V	1. Bagian Organisasi; 2. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 3. Bagian Hukum.	
49.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		V	-		V	Satuan Polisi Pamong Praja	
50.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya	Mencabut seluruh ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya		V	-		V	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	

**C. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA**

1.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung.	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---

2.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.	-	-	-	-	-	-	-	-

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA,



MASDUKI TOHA